

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam hal pembangunan yang ada di dalamnya (*owner*). (Adisasmita, 2006).

Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya Negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut bersama pemerintah dalam membangun suatu Negara. Salah upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan

pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (*Partnership*) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, saling jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu (Keith Davis, 2010).

Dalam hal partisipasi masyarakat kali ini, peneliti akan menambahkan pengertian tentang mangrove. Hutan bakau atau mangal adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang di dominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1988).

Keberadaan mangrove di Desa Tuada merupakan aspek penting dalam perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dipantai

Tuada, terlihat banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan pantai dan bersantai. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemuda dan pemerintah desa. Di desa Tuada terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung antara lain, gazebo (tempat berteduh) area terbuka, tempat parkir, kamar mandi dan warung makan. Obyek wisata di pantai Tuada ini sangat berperan penting dalam menambah pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Akan tetapi, masyarakat belum memiliki kesadaran dalam pengembangan wisata di pantai tersebut.

Menurut hasil penelitian Pasongli dkk, 2018. Hutan mangrove memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata di pantai Tuada ini dapat dilihat pada karakteristik lahan, yaitu ketebalan mangrove, aksesibilitas, pasang surut air laut, kemiringan lereng, dan kesediaan air tawar. Akan tetapi, keberadaan mangrove di desa Tuada masih sedikit dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengembangkan daerahnya yang menjadi masalah saat ini. Di daerah Tuada memiliki cukup banyak ekosistem mangrove yang dijadikan sebagai obyek wisata alam, akan tetapi hanya terdapat 9 jenis mangrove yang berada di daerah tersebut (Pasongli dkk. 2018), sehingga berdampak pada obyek wisata di daerah tersebut. Masyarakat setempat juga masih kurang paham mengenai peran, fungsi serta manfaat ekosistem mangrove, untuk itu perlunya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan mangrove di daerah tersebut.

Dari uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Hutan Mangrove Sebagai Obyek Wisata di Desa Tuada Kecamatan Jailolo”.

B. Pembatas Masalah

Dalam penelitian kali ini yang membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dan kendala yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat, maka peneliti hanya akan meneliti dua aspek yang berada pada kalangan sosial masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan hutan mangrove sebagai obyek wisata di desa Tuada?
2. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan hutan mangrove sebagai obyek wisata di desa Tuada?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengembangkan hutan mangrove sebagai obyek wisata di Desa Tuada Kecamatan Jailolo!
2. Serta menjelaskan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan hutan mangrove sebagai obyek wisata di Desa Tuada Kecamatan Jailolo?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk peneliti adalah agar peneliti dapat memahami secara luas tentang partisipasi suatu masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata yang terdapat di suatu daerah.
2. Manfaat untuk masyarakat dari penelitian ini adalah masyarakat lebih paham dan peduli terhadap lingkungan sekitar mereka dan mengembangkannya menjadi suatu obyek wisata yang layak untuk wisatawan lokal maupun non lokal.

